

---

**KOORDINASI DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN USIA  
SEKOLAH DI KABUPATEN SUBANG**

**Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP<sup>1)</sup> Diah Andani, S.AN., M.AP<sup>2)</sup>**  
Email: <sup>1)</sup>haniruchendi57@gmail.com, <sup>2)</sup>diah.andani30101992@gmail.com  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

**Abstrak**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Koordinasi Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang sesuai dengan faktor yang cukup penting yaitu koordinasi Menurut Mc Farland dalam Kaloh (2006) yaitu faktor kewenangan dan tanggung jawab, faktor komunikasi, faktor kontrol, dan faktor kepemimpinan..

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan fenomena dalam bentuk wacana. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan atau perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mc Farland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, Saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan. Komunikasi, diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari Pemerintah Kabupaten Subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahan-permasalahan lainnya. Kontrol, meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik. Kepemimpinan, terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbengkalainya tugas tugas tersebut.

Sesuai dengan faktor penting dalam koordinasi Menurut Mc Farland dalam Kaloh (2006) yaitu kewenangan dan tanggung jawab, komunikasi, kontrol, dan kepemimpinan, Koordinasi Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang Belum Optimal sebagaimana dijelaskan dalam *paragraph* diatas.

**Kata Kunci** : *Koordinasi*

## **Pendahuluan**

Persoalan ketertiban perkotaan yang menjadi isu besar di hampir seluruh perkotaan salah satunya yaitu anak jalanan, anak jalanan merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di masyarakat sebagai perwujudan dari permasalahan sosial. Kategori usia yang kebanyakan masih di bawah umur menunjukkan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga bahkan pemerintah sebagai pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan. Anak jalanan banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan, baik dalam menghabiskan waktu sehari-hari seperti hanya sekedar berkumpul dengan anak-anak jalanan lainnya hingga mencari nafkah. Watak dan perilaku sehari-hari para anak jalanan terbentuk sesuai dengan lingkungannya yaitu kasar, keras dan kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan karena kurang menyesuaikan dengan kondisi di jalanan.

Saat ini anak jalanan menjadi masalah publik di Kabupaten Subang, keberadaan mereka sering kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban, dan keamanan. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang tak kunjung teratasi. Maka dari itu menjadi masalah sosial baik di kota besar maupun di kota kecil. Berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah anak

jalanan di perkotaan salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah pada tingkat sekolah dasar yang belum berhasil diatasi, sehingga masalah anak jalanan tak kunjung teratasi dan merupakan fenomena sosial di Kabupaten Subang.

Anak jalanan adalah anak yang berusia antara 15-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum (Panduan Pendataan PMKS&PSKS, 2007). Sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomer 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat,serta peningkatan peran Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara

simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS dan PSKS.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tinggi dan segala permasalahan yang dimilikinya, tidaklah mengherankan jika jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Indonesia cukup tinggi. Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan ini dapat kita jumpai pada hampir setiap pelosok negeri ini. Misalnya seperti di Kabupaten Subang. Banyaknya jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang kerap kali terlihat memadati setiap perempatan dan ruas-ruas jalan utama bukan saja tidak sedap dipandang, melainkan menjadi isu serius yang perlu dicarikan jalan pemecahannya bersama. Anak jalanan Menurut Departemen Sosial RI (2005:5) anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus dan mobilitasnya tinggi.

Dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, Dinas Sosial Kabupaten Subang berupaya mencari jalan keluar baik melalui kegiatan maupun program yang diharapkan pelan namun pasti mampu mengurangi jumlah anak jalanan, yang tujuannya mewujudkan kesejahteraan dengan melibatkan berbagai pihak, agar upaya penanganan tersebut menjadi upaya bersama. Sebagaimana dikemukakan Adi (2005: 06) bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat, tidak akan terwujud bila tidak dikembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Penanganan anak jalanan di Kabupaten Subang dilakukan dengan upaya Pelaksanaan penanganan PMKS yaitu dengan adanya pencegahan timbulnya PMKS, Penanganan dan pembinaan PMKS, koordinasi pemulangan PMKS ke daerah asal dan pencegahan kembali menjadi PMKS, pembinaan dan pengawasan PMKS jalanan di Kab/kota daerah asal, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan adanya PMKS jalanan yang berada di Kabupaten Subang.

Namun sayangnya Pemerintah Kabupaten Subang hingga kini belum memiliki rumah singgah untuk menampung sejumlah anak telantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Padahal, jumlah mereka sudah

mencapai puluhan ribu dan belum mendapatkan penanganan optimal dari pemerintah daerah

Menurut sumber yang diperoleh oleh peneliti, sejauh ini belum ada anggaran untuk mendirikan rumah singgah ataupun mengelola panti asuhan bagi anak telantar, menurutnya dilakukan dengan melakukan berbagai pembinaan keterampilan bekerja sama dengan sejumlah panti dan yayasan di Subang. Alokasi dari APBD sejauh ini baru digunakan untuk pembekalan dan berbagai pelatihan keterampilan. Tujuannya, untuk meningkatkan taraf hidup anak telantar.

Berdasarkan hasil penjajagan awal yang penulis lakukan di wilayah Kota Subang, yaitu di temukan indikator masalah yang berkaitan dengan pengelolaan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Subang. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Subang dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan anak jalanan, itu terlihat masih lemahnya kewenangan dan tanggung jawab dalam ketertiban dan keamanan contohnya ditunjukkan menjamurnya anak jalanan di tengah-tengah perkotaan sehingga merusak keindahan kota, disinyalir belum terdapatnya sinergitas antara Dinas Sosial dan Satpol PP.

2. Pelaksanaan koordinasi tidak dilaksanakan secara kontinue, Dinas Sosial hanya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bilamana ada program kerja.
3. Kurangnya sosialisasi yang berkesinambungan dari Dinas Sosial Kabupaten Subang dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang penanganan anak jalanan.

### **Kajian Pustaka**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa organisasi merupakan salah satu unsur dari pada administrasi yang didalamnya terdapat komponen orang-orang, pejabat-pejabat, bagian-bagian dan para spesialis yang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda baik fungsi maupun peranannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam suatu sistem kerjasama yang sudah tertentu semuanya itu diarahkan atau dipadukan, sehingga merupakan *team work* yang mampu bekerja sama serta memanfaatkan alat serta dana yang ada. Secara maksimal guna pencapaian tujuan dari pada organisasi secara efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas dari pada organisasi, maka sudah seharusnya diperlukan adanya peran dari pada koordinasi karena tanpa adanya koordinasi yang baik, maka dimungkinkan masing-masing orang tersebut akan bekerja sendiri-sendiri, yang tentunya tidak menutup kemungkinan akan

mengakibatkan suatu hambatan terhadap usaha-usaha pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori koordinasi, koordinasi itu sendiri adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi (Hasibuan 2004: 86).

Adapun untuk mengukur penelitian ini, penulis menggunakan faktor-faktor penting dalam koordinasi menurut Mc Farland dalam Handayani (2004: 89), yakni:

1. Kewenangan dan tanggung jawab

Di dalam setiap organisasi apabila kita pandang dari situasi vertikal, maka kita akan melihat beberapa tingkat organisasi di mana masing-masing tingkat tersebut mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Dipandang dari situasi horisontal maka nampak beberapa kelompok, fungsi, divisi, atau teritorial.

2. Komunikasi.

Beberapa sarana yang dapat digunakan dalam menunjang fasilitas komunikasi yang efektif adalah komitmen, diskusi, sarana komunikasi, dan rapat staf.

3. Kontrol

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan apakah sesuatu aktivitas telah sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai. Setiap rencana dapat menjadi

usang (*out date*) sehingga memerlukan perbaikan. Untuk mengetahui apakah suatu rencana sudah usang maka diperlukan pengawasan.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebagai pengaruh antar pribadi, yang dilakukan pada suatu situasi dan dilakukan melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan selalu mencakup usaha dari pemimpin (*influence*) yang mempengaruhi tingkah laku pengikut (yang dipengaruhi) dalam suatu situasi tertentu. Kemampuan memimpin sangat penting didalam pelaksanaan koordinasi yang efektif untuk pencapaian tujuan organisasi yang baik. Berbagai teknik kepemimpinan memungkinkan si pemimpin dapat mengarahkan bawahannya.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa

tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Kepala Bagian Penanganan Anak Jalanan, Kepala Bidang Program, Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan. Berdasarkan kriteria keabsahan data diatas, penulis menggunakan kriteria kepercayaan (*credibility*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam analisis pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan tentang Koordinasi Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang menggunakan faktor-faktor penting dalam koordinasi menurut Mc Farland dalam Handayani (2004: 89)

kewenangan dan tanggung jawab dalam koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, dan salah satunya adalah saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan, hal tersebut juga terbukti dilihat secara kasat mata yakni masih terdapatnya anak jalanan usia sekolah yang tinggal di tengah tengah kota, tentu alasan ekonomi adalah faktor utama. Sudah merupakan tugas pemerintah, yakni Dinas Sosial dan khususnya bagian penanganan anak jalanan, selain Dinas Sosial tidak di pungkiri bahwa ini juga merupakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang, namun saling lempar tugas dan saling tunjuk tanggung jawab menjadi salah satu alasan lemahnya penanganan anak jalanan.

Komunikasi dalam koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut dinail berdasarkan forum diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi

dari Pemerintah Kabupaten Subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahan-permasalahan lainnya.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan pihak lainnya yang terkait dalam permasalahan penanganan anak jalanan hanya sebatas komunikasi pada saat adanya program kerja dari pemerintah setempat, selebihnya tidak dilanjutkan lagi mengingat banyak tugas lain yang diemban.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan apakah sesuatu aktivitas telah sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai. Setiap rencana dapat menjadi usang (*out date*) sehingga memerlukan perbaikan. Kontrol dalam permasalahan Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut dinilai karena meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik, sedangkan dalam hal ini tindakan berkelanjutannya tidak ada. Pengawasan bukan hanya masalah pemantauan atau kontrol saja, melainkan langkah yang akan dicapai untuk kedepannya.

Kepemimpinan adalah sebagai pengaruh antar pribadi, yang dilakukan pada suatu situasi dan dilakukan melalui proses komunikasi menuju pencapaian tujuan tertentu. kepemimpinan dalam permasalahan Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut terjadi karena terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbengkalainya tugas-tugas tersebut.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu Koordinasi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Usia Sekolah di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor penting dalam koordinasi Menurut Mc Farland dalam Kaloh (2006) yaitu sebagai berikut :

1. Kewenangan dan tanggung jawab, saling lempar tugas dan tunjuk tanggung jawab, sehingga dalam hal ini tugas pokok dalam penanganan anak jalanan menjadi jauh dari kata harapan, hal tersebut juga terbukti dilihat secara kasat mata yakni masih terdapatnya anak jalanan usia sekolah yang tinggal di tengah-tengah

kota, tentu alasan ekonomi adalah faktor utama.

2. Komunikasi, forum diskusi hanya diadakan saat adanya instruksi dari Pemerintah Kabupaten Subang terkait penertiban anak jalanan dari kota, setelahnya tidak ada komunikasi berkelanjutan, terlebih tindakan, dengan alasan kesibukan permasalahan-permasalahan lainnya.
3. Kontrol, meski pengawasan dilakukan akan tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan selanjutnya, sehingga sebenarnya pengawasan belum bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Sedangkan fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah bila mana hasil yang seharusnya tidak teralisasi dengan baik, maka harus dilaksanakan tindakan selanjutnya yang lebih baik, sedangkan dalam hal ini tindakan berkelanjutannya tidak ada. Pengawasan bukan hanya masalah pemantauan atau kontrol saja, melainkan langkah yang akan dicapai untuk kedepannya.
4. Kepemimpinan, terbaginya tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka dalam menangani permasalahan penanganan anak jalanan, tumpang tindih tugas dan kewajiban terbelengkalinya tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di

kemukakan sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah tidak saling tunjuk siapa yang bertanggung jawab, dan saling lempar siapa yang bertugas dalam menangani kasus anak jalanan usia sekolah, karna ini merupakan tugas pemerintah, sebaiknya pemerintah menyadari tugasnya masing-masing.
2. Diskusi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi lainnya yang terkait dalam bentuk komunikasi seharusnya berlanjut hingga tuntas, tidak hanya saat adanya program kerja atau instruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
3. Sebaiknya pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial setelah dilakukannya pengarahan tidak hanya sebatas mengawasi melainkan memberikan tindakan yang tegas kepada para anak jalanan yang masih tinggal dipusat Kota Kabupaten Subang.
4. Hendaknya Dinas Sosial memberikan dan membentuk satuan khusus untuk menangani permasalahan anak jalanan, sehingga satu pemimpin hanya mengemban satu tugas dan tidak akan ada istilah tumpang tindih tugas.

## Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI-Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handyaningrat, Soewarno, 2006. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T. H. 2005, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE,
- Hasibuan, Malayu. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke tujuh, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaloh Johannis, 2006, *Konsep Koordinasi Dalam Proses Administrasi*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moekijat, 2004, *Koordinasi (Suatu Tindakan Teoritis)*, Bandung: Mandar Maju
- Muhsin Kalida dan Bambang Sukamto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, Cakruk Publishing, Yogyakarta: 2012.
- Pamudi, 2008. *Koordinasi Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rivai Veithzal, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Salam Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Schein, Edgar H, 2008, *Organizational Culture and Leadership*, Third Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco
- Sudarsono, 2003, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sugandha,Dann. 2001, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak*, Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, Ace.2006. *Komunitas Sekolah Rumah*. Jakarta: Direktorat Jendral Luar Sekolah
- Sutarto, 2007, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Wina Sanjaya, 2002, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung, San Grafika

**Dokumen-dokumen:**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomer 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya, Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, Jakarta, 2000.

Departemen Sosial RI. 2005.

Hermawan, Oma. 2015. Koordinasi oleh Dinas tata Ruang Permukiman dan Kebersihan dengan Instansi Terkait dalam Penanganan Ketertiban, Keberhasilan, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Subang. *Skripsi*. Universitas Subang.